

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir proses akuntansi yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Proses akuntansi yang dimaksud meliputi proses pengumpulan dan pengolahan data akuntansi perusahaan tersebut dalam satu periode akuntansi. Dalam proses akuntansi tersebut didefinisikan berbagai transaksi atau peristiwa ekonomi yang dilakukan atau dialami oleh perusahaan melalui pengukuran, pencatatan, penggolongan atau pengklasifikasian, dan pengikhtisaran sedemikian rupa, sehingga hanya informasi yang relevan, yang mana saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya serta mampu memberikan gambaran secara layak tentang keandalan keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang akan digabungkan dan disajikan dalam laporan keuangan (Halim dan Mamduh, 2009).

Menurut PSAK No. 1 (2015:1) laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Berdasarkan pengertian-

pengertian tersebut diatas, sampai pada pemahaman penulis bahwa laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak *intern* maupun *ekstern* dalam rangka pengambilan keputusan dengan data dan aktivitas keuangan tersebut. Melalui laporan keuangan, pihak-pihak yang berkepentingan tersebut dapat melakukan pengukuran dan analisis terhadap keberhasilan atau kegagalan perusahaan.

2.1.1.1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (2015:3) adalah:

1. Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya.
2. Untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemakainya dalam hal pengambilan keputusan tentang perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan atau pihak manajemen tersebut.

2.1.2. Laporan Tahunan

Laporan tahunan (*Annual Report*) adalah suatu laporan resmi mengenai keadaan keuangan emiten dalam jangka waktu satu tahun. Laporan ini harus disampaikan kepada para pemegang saham untuk disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang selanjutnya disahkan sebagai laporan tahunan resmi perusahaan. Laporan tahunan (*Annual Report*) wajib disampaikan oleh emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai pelaporan kegiatan perusahaan selama satu tahun dan nantinya laporan ini akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Keseluruhan isi laporan tahunan ini diatur oleh regulator Bursa Efek yaitu BAPEPAM (Jumingan, 2011).

2.1.2.1. Tujuan Laporan Tahunan

Tujuan dari laporan tahunan (*Annual Report*) menurut (Jumingan, 2011) adalah :

1. Berguna bagi pemakai (*user*) laporan tahunan dalam membuat keputusan investasi, masalah kredit atau keputusan-keputusan lainnya.
2. Menyediakan laporan yang komprehensif mengenai prospek perusahaan di masa yang akan datang, baik kegiatan operasional, keuangan dan informasi-informasi relevan lainnya.

3. Menyediakan informasi lain mengenai sumber daya perusahaan serta perubahannya.

2.1.3. Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan pada dasarnya, dilakukan karena pemakai laporan keuangan ingin mengetahui tingkat keuntungan dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan (Halim dan Mamduh, 2009).

Menurut Kasmir (2013) analisis laporan keuangan adalah suatu proses analisis terhadap laporan keuangan dengan tujuan agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Dan hasil analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan mengetahui kelemahan ini, manajemen akan dapat memperbaiki atau menutupi kelemahan tersebut dan kekuatanyang dimiliki perusahaan harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.

Dengan menganalisis laporan keuangan, seorang analisis dapat menilai apakah manajer keuangan dapat merencanakan dan mengimplementasikan setiap tindakan secara konsisten dengan tujuan memakmurkan para pemegang saham. Menganalisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan satu periode dengan periode sebelumnya sehingga diketahui adanya kecenderungan (Sartono, 2012).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, sampai pada pemahaman penulis bahwa analisis laporan keuangan merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk memahami secara lebih mendalam data-data di dalam laporan keuangan.

2.1.3.1. Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2013) tujuan analisis laporan keuangan adalah :

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sampai pada pemahaman penulis bahwa analisis laporan keuangan adalah untuk memperoleh pandangan tentang posisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Dengan melakukan analisis laporan keuangan, maka informasi yang dibaca dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan lebih dalam. Hubungan satu pos dengan pos lain akan dapat menjadi indikator tentang posisi dan prestasi keuangan perusahaan serta menunjukkan bukti kebenaran penyusunan laporan keuangan.

2.1.4 Rasio Keuangan

Rasio keuangan berguna untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan dan menilai kinerja manajemen dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan melakukan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Aktivitas yang sudah dilakukan dituangkan dalam angka-angka. Angka-angka ini akan menjadi lebih apabila kita dapat bandingkan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Setelah melakukan perbandingan, dapat disimpulkan posisi keuangan suatu perusahaan periode tertentu (Fahmi, 2012).

Berikut ini penjelasan mengenai pengertian rasio keuangan menurut para ahli, antara lain : Menurut Kasmir (2014) Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang

ada di dalam laporan keuangan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Pengertian rasio keuangan menurut Harahap (2010) merupakan angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu akun laporan keuangan dengan akun lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Sedangkan pengertian rasio keuangan menurut Fahmi (2012) Rasio keuangan atau *financial ratio* ini sangat penting gunanya untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan.

Bagi investor jangka pendek dan menengah pada umumnya lebih banyak tertarik kepada kondisi keuangan jangka pendek dan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen yang memadai. Informasi tersebut dapat diketahui dengan cara lebih sederhana yaitu dengan menghitung rasio-rasio keuangan yang sesuai dengan keinginan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan merupakan suatu perhitungan matematis yang dilakukan dengan cara membandingkan beberapa pos atau komponen tertentu dalam laporan keuangan yang memiliki hubungan untuk kemudian yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan sebuah perusahaan.

a. Profitabilitas

Rasio profitabilitas perusahaan adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menciptakan tingkat keuntungan baik dalam bentuk laba perusahaan maupun nilai ekonomis atas penjualan, aset bersih perusahaan, maupun modal sendiri (Raharjaputra, 2009). Terdapat beberapa pengukuran terhadap profitabilitas perusahaan dimana masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva, dan modal sendiri (Syamsuddin, 2013). Ada 5 pengukuran profitabilitas :

1. *Gross profit margin* merupakan rasio untuk mengukur laba kotor dibandingkan dengan volume penjualan. Rasio ini mencerminkan atau menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai setiap rupiah penjualan. Semakin besar rasionya berarti semakin baik kondisi keuangan perusahaan (Munawir, 2001).
2. *Operating profit* merupakan rasio yang mengukur tingkat laba operasi dibandingkan dengan volume penjualan. Yang mana semakin tinggi rasio ini semakin baik. Dengan tingginya rasio ini akan menunjukkan kemampuan perusahaan yang tinggi dalam menghasilkan laba dimana akan menggambarkan kemampuan menghasilkan laba yang semakin tinggi dari perusahaan dan semakin tingginya laba

maka akan menunjukkan perubahan laba yang positif atau perubahan laba yang meningkat bagi perusahaan. Maka semakin tinggi nilai *operating profit margin* maka akan semakin tinggi pula perubahan laba (Munawir, 2001).

3. *Net profit margin* merupakan rasio yang mengukur laba bersih sesudah pajak dibandingkan dengan volume penjualan. Rasio ini digunakan untuk mengukur rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap satu rupiah penjualan dan mengukur seluruh efisien, baik produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, penentuan harga maupun manajemen pajak. Semakin tinggi rasionya menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Tetapi jika rasionya rendah menunjukkan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu, atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan tertentu, atau kombinasi dari kedua hal tersebut (Prastowo dan Juliaty, 2003).
4. *Return on asset* (ROA) merupakan rasio yang mengukur tingkat penghasilan bersih yang diperoleh dari total aktiva perusahaan. Rasio ini disebut juga rentabilitas ekonomis, dimana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam

hal ini laba yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga dan pajak (Sutrisno, 2001).

5. *Return on equity* (ROE) merupakan rasio yang mengukur tingkat penghasilan bersih yang diperoleh pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan. Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen Modal sendiri yang digunakan untuk membiayai Aktiva Tetap dalam pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Dalam Modal sendiri tersebut diatas termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya. Aktiva Tetap dalam pelaksanaan adalah posisi pada akhir tahun buku Aktiva Tetap yang sedang dalam tahap pembangunan (Sutrisno, 2001).

Manfaat analisis rasio profitabilitas menurut Sartono (2012) ada 5 adalah :

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh oleh perusahaan.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

b. Leverage

Leverage merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam hal menginvestasikan dana atau memperoleh sumber dana yang disertai dengan adanya beban atau biaya tetap yang harus ditanggung perusahaan (Irawati, 2006). Atmaja (2008) menyatakan bahwa rasio *leverage* mengukur hingga sejauh mana perusahaan dibiayai dari utang dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Perusahaan yang baik mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari utang. Rasio ini juga dianggap bagian dari rasio solvabilitas. Beberapa jenis *leverage* menurut Kasmir (2016) adalah :

1. *Debt to asset ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Hutang yang dimaksud adalah semua hutang yang dimiliki oleh perusahaan baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Kreditor lebih menyukai *debt ratio* yang rendah sebab tingkat keamanan dananya menjadi semakin baik.

2. *Debt to equity ratio* dihitung dengan membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini merupakan imbalan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. Bagi perusahaan sebaiknya, besarnya hutang tidak boleh melebihi hutang modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Semakin kecil rasio ini semakin baik. Maksudnya, semakin kecil porsi hutang terhadap modal, semakin aman.

3. *Long Term debt equity ratio* merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuan menghitung nilai rasio *Long Term debt equity* adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.

Manfaat *leverage* menurut Kasmir (2016) sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap.
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.

4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.

c. Likuiditas

Masalah Likuiditas berhubungan dengan masalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar yaitu aktiva yang mudah untuk diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, dan persediaan (Munawir, 2001).

Menurut Kasmir (2013) rasio likuiditas merupakan ketidakmampuan perusahaan membayar kewajibannya terutama jangka pendek (yang sudah jatuh tempo) yang disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu:

1. Bisa dikarenakan memang perusahaan sedang tidak memiliki dana sama sekali, atau
2. Bisa mungkin saja perusahaan memiliki dana, namun saat jatuh tempo perusahaan tidak memiliki dana (tidak cukup dana secara tunai sehingga harus menunggu dalam waktu tertentu, untuk mencairkan aset lainnya seperti menagih piutang, menjual surat-surat berharga, atau menjual sediaan atau aset lainnya).

Likuiditas merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas sangat penting bagi suatu perusahaan dikarenakan berkaitan dengan mengubah aset menjadi kas. Menurut Brigham dan Houston (2010) rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar perusahaan lainnya dengan kewajiban lancarnya. Halim dan Mamduh (2009) mendefinisikan rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya (hutang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan).

Sedangkan rasio likuiditas (*liquidity ratio*) menurut Fahmi (2014) adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Selain itu, menurut Sartono (2012) rasio likuiditas merupakan rasio yang

menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya, likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar yaitu aktiva yang mudah untuk diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutang, persediaan. Pengertian likuiditas menurut Fred Weston dalam Kasmir (2013) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, maka akan mampu memenuhi utang (membayar) tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, sampai pada pemahaman penulis bahwa likuiditas perusahaan dapat ditunjukkan oleh besar kecilnya aset lancar, yaitu aset yang mudah untuk diubah menjadi kas, surat berharga, piutang, persediaan. Tingkat likuiditas yang tinggi pada sebuah perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik, sedangkan tingkat likuiditas yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik.

1) Tujuan dan Manfaat Likuiditas

Perhitungan rasio likuiditas memberikan cukup banyak tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pihak yang paling

berkepentingan adalah pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan untuk menilai kinerja perusahaannya. Ada pihak luar perusahaan juga yang memiliki kepentingan, seperti pihak kreditor atau penyedia dana bagi perusahaan, misalnya likuiditas tidak hanya berguna bagi perusahaan, namun juga bagi pihak luar perusahaan (Fahmi, 2012).

Berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio likuiditas menurut Kasmir (2013) :

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya, jumlah kewajiban yang berumur satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan aktiva lancar.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.

4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa rasio likuiditas dapat menjadi alat perencanaan ke depan yang berhubungan dengan perencanaan kas dan utang. Perusahaan dapat mengukur kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo dengan mengukur jumlah uang kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban tersebut.

2) Metode Pengukuran Likuiditas

Secara umum tujuan utama rasio keuangan digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Dalam praktiknya, untuk mengukur rasio keuangan secara lengkap, dapat menggunakan jenis-jenis rasio likuiditas yang ada. Menurut Kasmir (2013) jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan, yaitu :

1. Rasio lancar (*Current Ratio*)

Rasio ini dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Aset lancar meliputi kas, efek yang dapat diperdagangkan, piutang usaha, dan persediaan.

Jika suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan, perusahaan mulai lambat dalam membayar tagihan (utang usaha), tagihan bank, dan kewajiban lainnya yang akan meningkatkan kewajiban lancar. Jika kewajiban lancar tinggi dibandingkan dengan aset lancar, maka *current ratio* akan turun, dan ini merupakan pertanda adanya masalah.

Menurut Kasmir (2013) *current ratio* adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dalam praktiknya, rasio lancar dengan standar 200% (2:1) yang terkadang sudah dianggap sebagai ukuran yang cukup baik atau memuaskan bagi suatu perusahaan. Menurut Fahmi (2014) rasio lancar (*current ratio*) adalah ukuran yang umum digunakan atau solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo. Sedangkan Menurut Sartono (2012) *current ratio* adalah rasio yang mengukur seberapa jauh aktiva lancar perusahaan bisa dipakai untuk memenuhi kewajiban lancarnya.

Perhitungan *current ratio* (CR) atau rasio lancar adalah sebagai berikut :

$$\text{Current Ratio (CR)} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, sampai pada pemahaman penulis bahwa rasio lancar (*current ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban jangka pendek yang akan segera jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancarnya. Rasio ini menunjukkan besarnya kewajiban lancar yang ditutup dengan aktiva lancar.

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat (*Quick Ratio*) atau *Acid test Ratio*. Rasio ini seperti *current ratio* tetapi kurang diperhitungkan karena tidak likuid dibandingkan dengan kas, surat berharga, dan piutang. Menurut Kasmir (2013) definisi rasio cepat (*quick ratio*) merupakan rasio uji cepat yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan (*inventory*).

Perhitungan *quick ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio (Acid test Ratio)} = \frac{\text{Aktiva Lancar - Persediaan}}{\text{Utang Lancar}}$$

3. Rasio kas (*Cash Ratio*)

Menurut Sudana (2011) *cash ratio* merupakan kemampuan kas dan surat berharga yang dimiliki perusahaan untuk menutup utang lancar. Sedangkan menurut Kasmir (2013) rasio kas (*cash ratio*) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti giro atau tabungan yang ada di bank. Perhitungan *cash ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Cash of Cash equivalent}}{\text{Current liabilities}}$$

4. Ratio Peputaran Kas (*Cash Turn Over*)

Kasmir (2013) menyatakan rasio peputaran kas (*cash turn over*) bermanfaat untuk mengukur tingkat kecukupan

modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan.

Perhitungan *cash turn over* adalah sebagai berikut:

$$\text{Cash Turn Over} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Rata-Rata}}$$

5. *Inventory to Net Working Capital*

Menurut Kasmir (2013) *inventory to net working capital* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Perhitungan *inventory to net working capital* adalah sebagai berikut:

$$\text{Inventory to Net Working Capital} = \frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Rata-Rata Persediaan}}$$

d. **Aktivitas**

Rasio aktivitas (*activity ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Menurut Kasmir (2013) Rasio aktivitas adalah rasio yang dipakai untuk melihat ukuran

tingkat efektivitas perusahaan dalam mempergunakan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Menurut Sartono (2012) rasio aktivitas menunjukkan bagaimana sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal, kemudian dengan cara membandingkan rasio aktivitas, maka dapat diketahui tingkat efisiensi perusahaan dalam industri. Menurut Van Horne Wachowicz dalam Dewi Fitriyani dan Deny Arnos Kway (2009) rasio aktivitas (*activity ratio*) adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan berbagai aktivasnya.

Rasio ini sering digunakan karena mencakup keseluruhan. Tanpa mempersoalkan jenis usaha apapun, *Total asset turn over* (TATO) menggambarkan seberapa besar dukungan semua aktiva yang dimiliki untuk memperoleh penjualan. Nilai *Total asset turn over* (TATO) yang semakin besar menunjukkan nilai penjualannya juga semakin besar dan harapan memperoleh laba juga semakin besar pula. Dengan demikian meningkatnya nilai *Total asset turn over* (TATO) maka laba perusahaan pun akan meningkat.

1) Tujuan dan Manfaat Rasio Aktivitas

Beberapa tujuan yang hendak dicapai perusahaan dari penggunaan rasio aktivitas menurut Kasmir (2013) antara lain:

1. Untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode.
2. Untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang (*days of receivable*), dimana hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari (berapa hari) piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih.
3. Untuk menghitung berapa hari rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang.
4. Untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode atau berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan (*working capital turn over*).
5. Untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode.
6. Untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan.

Kemudian disamping tujuan yang ingin dicapai diatas, terdapat beberapa manfaat yang dapat dipetik dari rasio aktivitas menurut Kasmir (2013), yakni sebagai berikut :

1. Dalam bidang piutang.
 - a. Perusahaan atau manajemen dapat mengetahui berapa lama piutang mampu ditagih selama satu periode.

Kemudian, manajemen juga dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Dengan demikian, dapat diketahui efektif atau tidaknya kegiatan perusahaan dalam bidang penagihan.

b. Manajemen dapat mengetahui jumlah hari dalam rata-rata penagihan piutang (*days of receivable*) sehingga manajemen dapat pula mengetahui jumlah hari (berapa hari) piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih.

2. Dalam bidang sediaan

Manajemen dapat mengetahui hari rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang. Hasil ini dibandingkan dengan target yang telah ditentukan atau rata-rata industri. Kemudian perusahaan dapat pula membandingkan hasil ini dengan pengukuran rasio beberapa periode yang lalu.

3. Dalam bidang modal kerja dan penjualan

Manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode atau dengan kata lain, berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan.

4. Dalam bidang aktiva dan penjualan

- a. Manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode.
- b. Manajemen dapat mengetahui penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan dalam suatu periode tertentu.

2) Metode Pengukuran Rasio Aktivitas

Dalam rasio-rasio aktivitas, analisa dapat dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

1. Perputaran Piutang (*receivable turn over*)

Menurut Kasmir (2013) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau beberapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Munawir (2012) mengatakan bahwa posisi piutang dan taksiran waktu pengumpulannya dapat dinilai dengan menghitung tingkat perputaran piutang *turn over receivable* yaitu, dengan membagi total penjualan kredit neto dengan piutang rata-rata.

$$\text{Receivable turn over} = \frac{\text{Penjualan Kredit}}{\text{Rata-Rata Piutang}}$$

Atau

$$\text{Receivable turn over} = \frac{\text{Penjualan Kredit}}{\text{Piutang}}$$

Untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang (*days of receivable*) Kasmir (2013) dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Days of receivable} = \frac{\text{Piutang Rata-Rata} \times 360}{\text{Penjualan Kredit}}$$

Atau

$$\text{Days of receivable} = \frac{\text{Jumlah Hari dalam 1 Tahun}}{\text{Perputaran Piutang}}$$

2. Perputaran Persediaan (*Inventory turn over*)

Menurut Sartono (2012) perputaran persediaan (*Inventory turn over*) merupakan perusahaan yang perputaran persediaannya yang makin tinggi itu berarti makin efisien, tetapi perputaran yang terlalu tinggi juga tidak baik, untuk itu diperlukan keseimbangan. Menurut Harahap (2011) perputaran persediaan adalah menunjukkan seberapa cepat perputaran persediaan dalam siklus produksi normal. Semakin cepat perputarannya semakin baik karena dianggap kegiatan penjual berjalan cepat. Perhitungan *Inventory turn over* sebagai berikut :

$$\text{Inventory turn over} = \frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Rata-Rata Persediaan}}$$

3. Perputaran modal kerja (*Working Capital Turn Over*)

Menurut Kasmir (2013) perputaran modal kerja (*Working Capital Turn Over*) adalah merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Menurut Munawir (2012), yang menyatakan bahwa ratio ini menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan penjualan dan menunjukkan banyaknya penjualan yang dapat diperoleh perusahaan (jumlah rupiah) untuk tiap rupiah modal kerja.

$$\text{Perputaran Modal Kerja} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Rata-Rata}}$$

Atau

$$\text{Perputaran Modal} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja}}$$

4. *Fixed Assets Turn Over*

Menurut Kasmir (2013) *Fixed Assets Turn Over* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar satu periode. Menurut Sartono (2012) Perputaran aktiva tetap adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap neto. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan menggunakan aktiva tetapnya seperti gedung, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor.

$$\text{Fixed Assets Turn Over} = \frac{\text{Penjualan (sales)}}{\text{Total Aktiva Tetap (total fixed assets)}}$$

5. Total Assets Turn Over

Menurut Sartono (2012) *Total Assets Turn Over* adalah menunjukkan bagaimana efektivitas perusahaan menggunakan keseluruhan aktiva untuk menciptakan penjualan dan mendapatkan laba. *Total Assets Turn Over* menurut Syamsuddin (2011) adalah mengukur berapa kali total aktiva perusahaan menghasilkan penjualan, ini juga dapat diartikan *Total Assets Turn Over* mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva.

$$\text{Total Assets Turn Over} = \frac{\text{Penjualan (Sales)}}{\text{Total Aktiva (Total Assets)}}$$

2.1.5. Earning Per Share

Investor dalam melakukan investasi di pasar modal membutuhkan ketelitian dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan saham. Penilaian saham secara akurat dapat meminimalkan resiko agar tidak salah dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, investor perlu menganalisis kondisi

keuangan perusahaan untuk pengambilan keputusan dalam melakukan investasi saham. Untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan, investor dapat melakukannya dengan menghitung rasio keuangan perusahaan yaitu *Earning Per Share* (Anggita dan Rizkia, 2012).

Pengertian *Earning Per Share* (EPS) menurut Kasmir (2016) merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Semakin tinggi nilai EPS tentu saja menggembirakan pemegang saham karena semakin besar laba yang disediakan untuk pemegang saham. Rasio laba menunjukkan dampak gabungan dari likuiditas serta manajemen aktiva dan kewajiban terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Jadi, disimpulkan bahwa EPS merupakan suatu rasio yang menunjukkan jumlah laba yang didapatkan dari setiap lembar saham yang ada.

Pengukuran EPS menurut Tandelilin (2010) yaitu perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan jumlah saham yang beredar.

Menurut Brigham dan Houston terjemahan Ali Akbar Yulianto (2006), faktor-faktor penyebab kenaikan dan penurunan *Earning Per Share* (EPS) adalah :

1. Laba bersih naik dan jumlah lembar saham biasa yang beredar tetap.

2. Laba bersih tetap dan jumlah lembar saham biasa yang beredar turun.
3. Laba bersih naik dan jumlah lembar saham biasa yang beredar turun.
4. Persentase kenaikan laba bersih lebih besar dari pada persentase kenaikan jumlah lembar saham biasa yang beredar.
5. Persentase penurunan jumlah lembar saham biasa yang beredar lebih besar dari pada persentase penurunan laba bersih.

Jadi bagi suatu perusahaan, nilai laba per saham akan meningkat apabila persentase kenaikan laba bersihnya lebih besar dari pada persentase kenaikan jumlah lembar saham biasa yang beredar, begitu pula sebaliknya.

2.1.6. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Menurut Hery (2010) *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Menurut Kurniawan (2012) *Good Corporate*

Governance adalah seperangkat hubungan yang terjadi antara manajemen, direksi, pemegang saham, dan *stakeholders-stakeholders* lain seperti pegawai, kreditor dan karyawan.

Tata Kelola perusahaan (*Corporate Governance*) merujuk pada sistem manajemen dan pengendalian manajemen, Menurut Ismanto (2009) definisi GCG (*Good Corporate Governance*) merupakan sistem yang mengatur bagaimana perusahaan dikelola dan dikendalikan sistem tersebut mengarahkan berbagai hubungan antara para pemegang saham perusahaan, dewan direksi, serta para manajemen senior.

Berdasarkan definisi yang sudah dipaparkan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya *Good Corporate Governance* adalah sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

2.1.6.1 Manfaat *Good Corporate Governance*

Penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan memiliki peranan yang besar dan manfaat yang bisa membawa perubahan positif bagi perusahaan baik di kalangan investor, pemerintahan maupun masyarakat umum.

Menurut Agoes (2009) manfaat penerapan *Good Corporate Governance*, antara lain :

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Sedangkan Menurut *Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) (2009), keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila menerapkan konsep GCG sebagai berikut :

1. Meminimalkan *agency cost*.
2. Meminimalkan *cost capital*.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan.
4. Mengangkat citra perusahaan.

Adapun penjelasan tentang keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila menerapkan *good corporate governance* sebagai berikut :

1. Meminimalkan *agency cost*

Selama ini para pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya-biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

2. Meminimalkan *cost of capital*

Perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman, selain itu dapat memperkuat kinerja keuangan juga akan membuat produk perusahaan akan menjadi lebih kompetitif.

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan

Suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Sebuah survey yang dilakukan oleh *Russel Reynold Associates* (1997) mengungkapkan bahwa kualitas dewan komisaris adalah salah satu faktor utama yang dinilai oleh investor institusional sebelum

mereka memutuskan untuk membeli saham perusahaan tersebut.

4. Mengangkat citra perusahaan

Citra perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan perusahaan tersebut dimata masyarakat dan khususnya para investor.

Citra (*Image*) suatu perusahaan terkadang akan menelan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan keuntungan perusahaan itu sendiri, guna memperbaiki citra perusahaan tersebut. Manfaat dari penerapan *good corporate governance* tentunya sangat berpengaruh bagi perusahaan, dimana manfaat *good corporate governance* ini bukan hanya saat ini tetapi juga dalam jangka panjang. Selain itu bermanfaat meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat terutama bagi para investor.

2.1.6.2 Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan dari *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, apabila *good corporate governance* dalam kepemilikan dapat berjalan dengan baik maka dapat meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan. Penerapan *good corporate governance* di lingkungan BUMN dan BUMD mempunyai tujuan sesuai

KEPMEN BUMN No.KEP-11&/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2001 pada pasal 4 yaitu :

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
6. Mensukseskan program privatisasi.

2.1.6.3. Mekanisme *Good Corporate Governance*

Pengelolaan perusahaan (*corporate governance*) itu sendiri dapat diartikan secara luas pada literatur yang ada dan terbatas. Secara terbatas, istilah tersebut berkaitan dengan

hubungan antara manajer, direktur, auditor dan pemegang saham, sedangkan secara luas istilah pengelolaan perusahaan dapat meliputi kombinasi hukum, peraturan, aturan pendaftaran dan praktik pribadi yang meningkatkan perusahaan menarik modal masuk, memiliki kinerja yang efisien, menghasilkan keuntungan, serta memenuhi harapan masyarakat secara umum dan sekaligus kewajiban hukum. Keberadaan organ-organ tambahan tersebut memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan *good corporate governance* (Tunggal, 2013).

Organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG menurut (Tunggal, 2013), yaitu :

a. Ukuran Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 menjelaskan Dewan Komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Komite Kebijakan Nasional *Governance* (KNKG) (2006) mendefinisikan dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa

perusahaan melaksanakan GCG, Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Sedangkan menurut Sembiring (2005) ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan.

Berdasarkan definisi di atas dari Undang-Undang Perseroan terbatas No.40 Tahun 2007 ayat 2, KNKG (2006) dan Sembiring (2005), maka dapat disimpulkan ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota komisaris dalam perusahaan yang melakukan pengawasan terhadap direksi dalam menjalankan perusahaan.

b. Dewan Komisaris Independen

Tunggal (2013) menyatakan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Komisaris Independen menurut Agoes dan Ardana (2014) adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang

dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.

Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Berdasarkan ketiga definisi di atas dari Tunggal (2013), Agoes dan Ardana (2014) serta Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, pemegang saham, dan anggota dewan komisaris lainnya.

c. Kepemilikan Institusional

Pengertian Kepemilikan Institusional menurut Widarjo (2010) adalah kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa pemerintah, institusi swasta maupun asing. Menurut Masdupi (2005) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki

institusional pada akhir tahun yang diukur dalam presentase saham yang dimiliki oleh investor institusional dalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut Thesarani (2016) mengungkapkan Kepemilikan Insitusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam *presentase* saham yang dimiliki investor institusional dalam perusahaan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*.

Dari ketiga defnisi diatas dari dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki institusional dalam suatu perusahaan pada akhir tahun. Adanya kepemilikan institusional disuatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan (Winanda, 2009).

d. Kepemilikan Manajemen

Kepemilikan manajemen adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham (Tjeleni, 2013). Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajemen sebagai suatu instrument atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan. Meningkatkan kepemilikan manajemen digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Meningkatnya kepemilikan manajemen maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dalam hal ini akan berdampak baik kepada perusahaan serta memenuhi keinginan para pemegang saham (Thesarani, 2016).

Kepemilikan manajemen diukur dengan proporsi saham yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun dan dinyatakan dalam persentase. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah mereka sendiri (Mahadwartha, 2003). Proksi kepemilikan manajemen adalah dengan menggunakan persentase kepemilikan

manajer, komisaris, dan direktur terhadap total saham yang beredar (Chen dan Steiner dalam Kartika Nuringsih, 2005). Kepemilikan manajemen dihitung dengan cara memperbandingkan jumlah saham direksi, komisaris, dan manajer dengan jumlah saham yang beredar (Nuringsih, 2005).

e. Komite Audit

Pengertian Komite audit menurut Tugiman (1995), Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membentuk auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Menurut Arents (2010), menjelaskan pengertian komite audit. Umumnya komite audit terdiri dari tiga atau lima kadang tujuh orang yang bukan bagian dari manajemen perusahaan. Tujuan dibentuknya komite audit yaitu untuk menjadi penengah antara auditor dan manajemen perusahaan apabila terjadi perselisihan.

Sedangkan menurut Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep-29/PM/2004 mengemukakan bahwa Komite Audit adalah

komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komite audit adalah anggota komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang berkerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris, salah satu tugasnya yaitu memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan komite audit juga bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit ini merupakan orang yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Adanya komite audit diharapkan mampu mengontrol dan memonitor keputusan yang dilakukan manajer itu sudah benar yang berarti bahwa keputusan tidak memihak suatu pihak, namun mengikat semua pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Komite Audit dituntut dapat bertindak secara independen, independensi komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini perlu didasari karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor (Thesarani, 2016).

2.1.7. CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Di Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan secara tegas bahwa CSR (*Corporate Social Responsibility*) telah menjadi kewajiban perusahaan. Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa definisi dari CSR adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. CSR sebagai mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Tanggung jawab sosial secara lebih sederhana dapat dikatakan sebagai timbal balik perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Proses pengambilan keuntungan tersebut perusahaan seringkali menimbulkan kerusakan lingkungan dan dampak sosial lainnya (Darwin, 2004).

Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. PP ini merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan beberapa regulasi di atas perusahaan diwajibkan untuk melakukan CSR. Salah satu yang

diatur adalah mekanisme pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan. Pasal 4 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012 menyebutkan, “*Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan*”. Implementasi CSR merupakan suatu wujud komitmen yang dibentuk oleh perusahaan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan (Susiloadi, 2008).

Pengungkapan CSR dalam penelitian ini menggunakan GRI. Total indikator yang terdapat di GRI saat ini adalah 91 item. *Global Reporting Initiatives* (GRI) merupakan suatu jaringan organisasi non-pemerintahan yang didirikan oleh CERES dan UNEP pada tahun 1997 di Boston (AS), namun pada tahun 2002 kantor pusatnya dipindahkan ke Amsterdam. GRI menghasilkan rerangka konseptual, prinsip-prinsip, pedoman, indikator-indikator yang berterima umum secara global untuk mendorong organisasi lebih transparan dan juga agar bisa digunakan untuk mengukur dan melaporkan kinerja sosial, lingkungan dan ekonomi organisasi dalam suatu media pelaporan yang terintegrasi yang disebut *Sustainability Reporting*. Selain mengatur prinsip-prinsip pelaporan dan transparansi, GRI juga mengatur tentang HAM, tenaga kerja, anti korupsi, dan lingkungan. GRI sebagai salah satu yang diharapkan dapat menjadi alat bantu

setiap perusahaan dalam menyusun laporan CSR perusahaan.
(www.globalreporting.org).

2.2 Penelitian Terdahulu

Sembiring (2005) melakukan penelitian mengenai hubungan antara karakteristik perusahaan dan pengungkapan CSR di Indonesia. Karakteristik perusahaan dalam penelitian ini terdiri atas ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri, ukuran dewan komisaris dan *leverage*. Penelitian ini menemukan bahwa ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris dan tipe industri mempengaruhi pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia.

Sementara Anugerah dkk (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *leverage* dan profitabilitas terhadap CSR pada perusahaan manufaktur di BEI. Anugerah dkk, menemukan bahwa Ukuran perusahaan, profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini menemukan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas berpengaruh positif signifikan dan *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Santoso dan Chandra (2012). Santoso dan Chandra melakukan penelitian pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, umur perusahaan, dan dewan komisaris independen dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan dewan

komisaris independen berpengaruh signifikan. Sedangkan *leverage* dan umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Wijaya (2012) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan di BEI. Dimana penelitian ini menggunakan ukuran dewan komisaris, *leverage*, profitabilitas, kinerja lingkungan, dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian ini ukuran dewan komisaris, *leverage*, profitabilitas, kinerja lingkungan tidak berpengaruh signifikan dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Aurelia (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor fundamental perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Dimana menggunakan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap CSR. Hasil penelitian ini diperoleh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

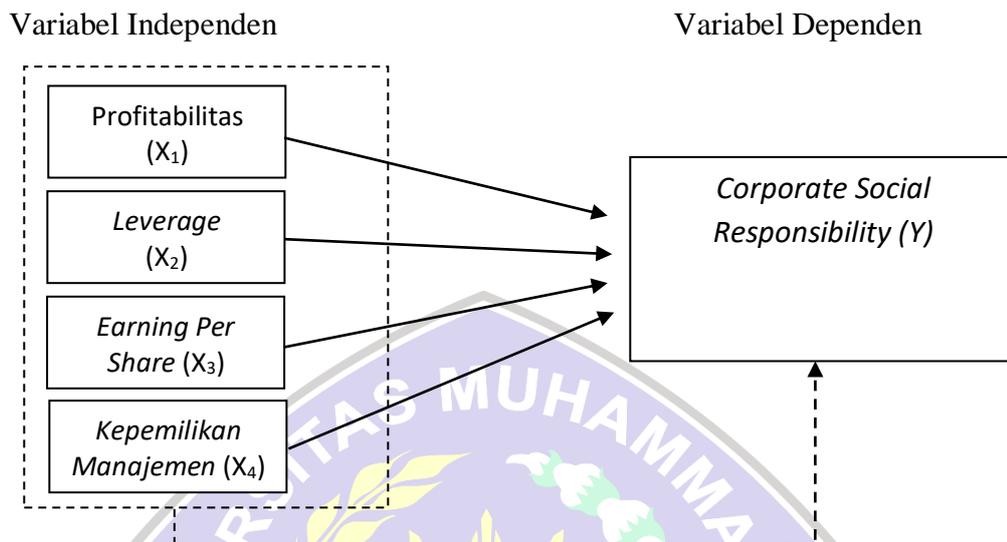
Setyarini dkk (2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap *corporate social responsibility*. Dimana menggunakan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen terhadap CSR. Hasil penelitian yang diperoleh Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Tabel 2.1. Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
1.	Sembiring (2005)	Variabel independen: <i>Size</i> , profitabilitas, <i>profile</i> perusahaan, ukuran dewan komisaris, <i>leverage</i> . Variabel dependen: Pengungkapan tanggung jawab sosial.	<i>Size</i> , <i>profile</i> perusahaan, dan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan sosial sedangkan <i>leverage</i> dan profitabilitas tidak berpengaruh.
2.	Anugerah, Hutabarat, dan W. Faradilla (2010)	Variabel Independen: ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan profitabilitas. Variabel dependen: Pengungkapan tanggung jawab sosial	Ukuran perusahaan, profitabilitas berpengaruh positif signifikan dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan CSR.
3.	Santoso, Chandra (2012)	Variabel Independen : Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Umur Perusahaan, Dan Dewan Komisaris Independen Variabel Dependen : Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	Profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan dewan komisaris independen berpengaruh signifikan. Sedangkan <i>leverage</i> dan umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.
4.	Wijaya (2012)	Variabel Independen : Ukuran dewan komisaris, <i>leverage</i> , profitabilitas, kinerja lingkungan, dan ukuran perusahaan Variabel Dependen : Pengungkapan CSR	Ukuran dewan komisaris, <i>leverage</i> , profitabilitas, kinerja lingkungan tidak berpengaruh signifikan dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.
5.	Aurelia (2012)	Variabel Independen : Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan <i>leverage</i> Variabel Dependen : Pengungkapan CSR.	Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.
6.	Setyarini dan Paramitha (2011)	Variabel Independen : Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen Variabel Dependen : Pengungkapan CSR.	Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

→ = Pengaruh interaksi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

-----> = Pengaruh interaksi variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

1.4 Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Corporate Social Responsibility*

Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham, sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin besar pula pengungkapan informasi sosialnya (Anugerah dkk, 2010).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Wijayanto dalam Dahlia (2010) menyatakan bahwa semakin besar profit yang diperoleh suatu perusahaan diharapkan memberikan transparansi laporan yang besar pula. Demikian pula dengan pernyataan Untari (2010) yang menyatakan bahwa semakin besar profitabilitas suatu perusahaan akan mengungkapkan tanggung jawab sosial yang lebih besar karena sorotan yang besar dari masyarakat. Sehingga hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah :

Ho₁ : Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility

Ha₁ : Profitabilitas berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility

b. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Corporate Social Responsibility*

Semakin tinggi tingkat *leverage* (rasio utang/ekuitas) semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi. Supaya laba yang dilaporkan tinggi maka manajer harus mengurangi biaya-biaya, termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial (Yintayani, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Gautama (2015) dengan menggunakan tiga variabel independen yaitu likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage* dan struktur kepemilikan. Hasilnya secara parsial variabel *leverage* secara signifikan berpengaruh negatif terhadap

pengungkapan *corporate social responsibility*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aurelia (2012) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Dari hasil penelitian terdahulu tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₀₂ : Leverage tidak berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility

H_{a2} : Leverage berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility

c. Pengaruh *Earning per share* Terhadap *Corporate Social Responsibility*

EPS atau laba per lembar saham merupakan perbandingan antara jumlah laba setelah pajak dengan jumlah saham yang beredar. EPS merupakan rasio yang mengukur berapa besar laba bersih yang dihasilkan perusahaan untuk tiap-tiap lembar saham yang beredar dan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu perusahaan (Arista dan Astohar, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Rosdiawati (2016) dengan menggunakan tiga variabel independen yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, EPS dan struktur kepemilikan. Hasilnya secara parsial variabel EPS secara signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Dimana jika EPS semakin tinggi maka akan mempengaruhi aktivitas CSR sebuah perusahaan. Dengan demikian hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah :

H₀₃ : Earning per share tidak berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility

H_{a3} : Earning per share berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility

d. Pengaruh Kepemilikan Manajemen Terhadap Corporate Social Responsibility

Teori agensi menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika principal (orang yang memiliki modal) membayar manajer profesional untuk bertindak atas namanya dan mendelegasikan kekuasaan untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan perusahaan atau karyawan. Menurut teori ini, agen secara alami memiliki kepentingan sendiri (*conflict of interest*). Maka, kepemilikan manajemen ini akan meminimalisir kasus keagenan, sebab manajer tersebut juga sekaligus pemegang saham, sehingga manajer tidak akan bekerja untuk kepentingan manajer saja tetapi juga akan lebih memperhatikan kepentingan pemegang saham sebab mereka juga merupakan pemegang saham.

Direksi, manajer, dan dewan komisaris yang sekaligus pemegang saham tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan dengan lebih memperhatikan pengungkapan CSR, karena dengan meningkatnya pengungkapan CSR minat investor untuk menanamkan sahamnya juga akan meningkat, sehingga nilai perusahaan tentu akan meningkat pula yang mengakibatkan nilai kekayaannya sebagai pemegang saham juga akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Setyarini dan Paramitha (2011) dengan menggunakan tiga variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen. Hasilnya secara parsial variabel kepemilikan manajerial secara signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Dengan demikian hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah :

H₀₄: Kepemilikan Manajemen tidak berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility

H_{a4}: Kepemilikan Manajemen berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility

e. Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Earning Per Share*, dan Kepemilikan Manajemen Terhadap *Corporate Social Responsibility*

Profitabilitas yang ditentukan dari keuntungan perusahaan dapat digunakan sebagai penentu untuk perusahaan melakukan tanggung jawab sosialnya, selain itu *earning per share* dan kepemilikan manajemen juga menjadi alasan perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang digunakan untuk menarik investor dan bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat. Namun lain hal dengan *leverage* dimana perusahaan dengan *leverage* yang tinggi memiliki kemampuan yang rendah dalam melakukan kegiatan sosialnya dan berakibat rendahnya pengungkapan dikarenakan perusahaan berusaha untuk tidak

melanggar kontrak hutang dengan mengurangi aktivitas pengurang laba.

Dengan demikian hipotesis kelima yang dapat dirumuskan adalah :

H₀₅: Profitabilitas, Leverage, Earning Per Share, dan Kepemilikan Manajemen tidak berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility

H_{a5}: Profitabilitas, Leverage, Earning Per Share, dan Kepemilikan Manajemen berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility

